



► PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

Dewan Minta Pengusaha Lokal Digandeng

UMBULHARJO—Jajaran eksekutif maupun legislatif di Kota Jogja bersiap dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

DPRD Kota Jogja mendorong program ini bisa menggandeng pengusaha lokal. Besarnya kebutuhan konsumsi untuk program MBG ini dinilai bisa menggulirkan ekonomi di Kota Jogja jika tersistem dengan baik. Dengan demikian *multiplier effect* diharapkan terjadi. Di satu sisi terjadi perbaikan gizi, di sisi lain ekonomi juga tumbuh.

"Kami [DPRD Kota Jogja] berharap pihak yang mendapatkan kesempatan dari Pemerintah Pusat menjadi penyedia MBG bisa memberdayakan UMKM sehingga setiap titik yang menjadi dapur, masyarakat di sekitarnya dapat tumbuh ekonominya," ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja, Sinarbiat Nujanat, Jumat (6/12).

Sinar mengatakan, jajarannya kini tengah menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat. Namun, yang pasti kini DPRD Kota Jogja telah melakukan persiapan berupa *refocusing* anggaran. Dia menyebut APBD yang dialokasikan untuk program MBG mencapai Rp 90 miliar. Anggaran Rp75 miliar di antaranya

digunakan untuk keperluan pembelian bahan makanan. Sedangkan Rp15 miliar digelontorkan untuk biaya tak terduga. "Kami menunggu juknis dari Pemerintah Pusat," tuturnya.

Disinggung soal porsi MBG yang disebut dianggarkan sebesar Rp10.000, Sinar mengatakan jajarannya masih menunggu instruksi lanjutan. Sebab, dia mengatakan anggaran akan kembali dipecah untuk beberapa keperluan, mulai dari gaji tenaga, listrik, air, maupun biaya lain selain keperluan bahan makanan. "Untuk anggaran Rp10.000 masih menunggu kepastian, apakah hanya untuk menu makanan atau termasuk gaji pegawai dan sebagainya," katanya.



Sinarbiat Nujanat

Penjabat Wali Kota Jogja, Sugeng Purwanto, memastikan anggaran MBG tak memengaruhi anggaran pada sektor penting di Kota Jogja, seperti sektor pendidikan, infrastruktur, ataupun penanganan sampah. Penghematan dilakukan pada hal yang memang bisa dihapus.

"Harapannya *refocusing* tidak mengganggu rutinitas, tidak mengganggu hak masyarakat, tapi memang ada mercusuar kegiatan yang awalnya ada, tetapi terpaksa dihilangkan terutama yang sifatnya sporadis, tidak rutin, dan tidak *long term*," katanya. (A/H Annissa Karin)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005